

4,63% pada tahun 2008 menjadi 28,05% pada tahun 2013. Di samping itu, pertumbuhan sektor indus-

Pemerintah Kabupaten Kota dalam penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Ren-

yang masuk merupakan hampir Rp 400 triliun, didorong oleh PMA sebesar 67,84% dan lebih banyak

lingkungan strategis baik yang bersifat internal maupun eksternal. ●munib

Ponsel Dinilai Bebas Produsen Lokal

atau maksudnya untuk mengurangi impor karena ada persoalan defisit neraca transaksi berjalan itu persoalan lain," sambung dia.

Mahendra mengaku, beberapa industri ponsel dalam negeri sudah berjalan. Namun menurut dia, pemerintah perlu mendorong peningkatan daya saing industri tersebut supaya bisa lebih kompetitif dengan produk ponsel impor.

"Saya rasa ke depan kita perlu memperbaiki daya saing mereka dari segi penurunan biaya logistik, kemudahan perpajakan maupun proses barang masuk dan keluar. Kita bukan mau intervensi kepada perbandingan harga, tapi daya saing penting. Walaupun pasar besar tapi daya saingnya belum dimaksimalkan, maka investasi belum tentu terjadi," tandas dia.

Sebelumnya, Mendag Muhammad Lutfi mendukung usulan pengenaan PPnBM sebesar 20% untuk produk ponsel dengan nilai jual di atas Rp 5 juta. Dia mengatakan, pengenaan PPnBM ini selain diharapkan akan mengurangi impor ponsel yang masuk ke Indonesia. Selain itu, pengenaan PPnBM juga akan menarik investasi industri ponsel di dalam negeri. "Kalau ditanya apakah

setuju atau tidak, saya setuju. Ini bagian dari proses supaya investasinya datang," ujar Lutfi.

Picu Penyelundupan

Sementara itu, Asosiasi Ponsel Seluruh Indonesia (APSI) mengungkapkan, penerapan PPnBM terhadap telepon seluler (ponsel) atau smartphone dapat memberikan dampak yang cukup besar bagi industri ponsel nasional. Dapat diketahui, pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan menerapkan PPnBM sebesar 20% terhadap barang mewah seperti smartphone atau ponsel.

Ketua Umum APSI Hasan Aula mengatakan, dampak yang sudah jelas akan terjadi jika PPnBM diterapkan adalah meningkatkan pasar gelap atau black market ponsel di Indonesia. "Jika diterapkan peningkatan black market akan 50%, dan industri dalam negeri akan menurun 50%," kata Hasan.

Hasan melanjutkan, tidak hanya meningkatkan pasar gelap bagi ponsel, penerapan PPnBM terhadap ponsel atau smartphone ini juga dapat memberikan dampak terhadap penerimaan pajak dari sektor industri ponsel. "Potensialnya harga barang market dengan nonmarket

akan berbeda sangat jauh, banyak barang BM beredar di Indonesia, tentunya harga market akan jauh. Itu yang ditakutkan," tambahnya.

Tidak hanya itu, sambung Hasan, rencana investasi di sektor industri ponsel juga akan terkena dampak, jika pemerintah benar-benar menerapkan PPnBM terhadap smartphone atau ponsel mewah dengan besaran 20%. "Investasi lokal yang diplanning akan kena dampak, banyak pabrik yang lokalisasi akan mundur, karena tidak dapat bersaing, jadi ini menjadi concern buat kita," tukasnya.

Jika memang PPnBM itu diterapkan terhadap ponsel, Wakil Ketua APSI Lee Kang Hyun menyatakan bahwa konsumen telepon seluler (ponsel) di Indonesia dipastikan akan

menanggung beban dari rencana pemerintah mengenakan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) sebesar 20% "Tidak ada cara lain, otomatis dengan kondisi sekarang, harga harus naik," kata Lee.

Lee mengatakan, rencana pemerintah mengenakan 20% PPnBM untuk seluruh ponsel tidak hanya akan memberatkan industri ponsel, namun juga konsumen. Para produsen otomatis akan mengalihkan beban produksi tambahan kepada konsumen. Lee juga menyayangkan, ternyata bukan hanya ponsel impor saja yang bakal dikenai PPnBM. Impor lokal pun juga bakal kena. Padahal, untuk memproduksi ponsel di dalam negeri, bahan baku dan komponennya juga sudah dikenai bea masuk sebesar 5 hingga 15. ●hari

Angka 15 persen itu normal, tidak terlalu berlebihan optimistis-nya tapi juga tidak pesimis, karena peningkatan tidak akan terlalu luar biasa seperti tahun-tahun sebelumnya," kata Mahendra dalam kesempatan sebelumnya.

Saat ini, menurut Mahendra, perkembangan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sangat pesat dan mampu bersaing dengan investasi yang berasal dari Penanaman Modal Asing (PMA). Jika lima tahun lalu posisinya 1:6, maka memasuki 2013 investasi PMDN sudah mencapai setengah dari PMA. "Ini perkembangan yang luar biasa," ujar Mahendra.

Menurut Mahendra, peningkatan koordinasi dan kerja sama antara BKPM dengan pemerintah daerah menjadi pendorong investor dalam negeri makin meningkat. Mahendra mengharapkan sistem pengupahan ber-

bilang, tidak terlalu berlebihan optimistis-nya tapi juga tidak pesimis, karena peningkatan tidak akan terlalu luar biasa seperti tahun-tahun sebelumnya," kata Mahendra dalam kesempatan sebelumnya.

Disinggung target yang cukup besar itu, Mahendra optimistis bisa mencapainya. Keyakinannya itu dilandasi beberapa kebijakan dan program pemerintah, termasuk di antaranya yang berhubungan dengan hilirisasi industri mineral beberapa aturan.

Mehendra mencontohkan, hilirisasi mineral yang berlangsung saat ini, BKPM sudah memberikan izin untuk sejumlah perusahaan yang nilai investasinya kurang lebih mencapai Rp150 triliun.

nyak kelapa sawit saja sudah menyumbang sekitar Rp180 triliun, belum lagi dari lima sektor lain yakni tanaman pangan dan perkebunan, pertambangan, industri pengolahan, peternakan, dan jasa.

Jika dipilah, sektor manufaktur dan jasa memberikan kontribusi besar yang cukup konsisten sejak 2010 dan merupakan nilai penting dalam menciptakan lapangan kerja. Dari dua sektor tersebut, menyumbang 80% atau Rp102,5 triliun. "Itu lah alasan mengapa perkiraan 15% pertumbuhan cukup optimistis karena kinerja 2013 baik. Terutama perusahaan investasi baru semakin besar di lima plan real tersebut," jelasnya. ●munib



PT JAKARTA INTERNATIONAL HOTELS & DEVELOPMENT Tbk
("Perseroan")

PEMBERITAHUAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, maka dengan ini diberitahukan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Jumat, 16 Mei 2014
Waktu : 14.00 WIB - selesai
Tempat : Hotel Borobudur Jakarta, ruang Sumba B,
Jl. Lapangan Banteng Selatan No.1, Jakarta Pusat.

Panggilan untuk Rapat sesuai Pasal 12 ayat 3a Anggaran Dasar Perseroan akan dilakukan pada tanggal 30 April 2014 dalam 2 (dua) surat kabar harian yang beredar secara nasional di Indonesia.

Para pemegang saham yang bernak atau diwakilkan dalam Rapat adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 29 April 2014 pukul 16.00 WIB.

Setiap usulan para Pemegang Saham akan dimasukkan dalam Agenda Rapat, jika memenuhi persyaratan dalam Pasal 11 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan dan paling lambat diterima Perseroan 7 (tujuh) hari sebelum Panggilan Rapat.

Jakarta, 15 April 2014
Direksi Perseroan

PENGUMUMAN

Direksi PT PARAMITA BANGUN SARANA, Berkedudukan di Jakarta Pusat ("Perseroan"). Dengan ini mengumumkan bahwa akan terjadi perubahan pemegang saham mayoritas dalam Perseroan. Keberatan atau sanggahan dapat diajukan kepada direksi dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak pengumuman ini ke alamat korespondensi:

PT PARAMITA BANGUN SARANA
Jl. Petojo Utara VI No. 6 Rt.014/Rw.03
Kel. Petojo Utara, Kec. Gambir, Jakarta Pusat

Pengumuman ini disampaikan untuk memenuhi ketentuan Pasal 125 dan 127 Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Jakarta, 15 April 2014

Direksi
PT PARAMITA BANGUN SARANA

PENGUMUMAN PEMBUBARAN PT. INTERLINE INDONESIA

Dengan ini mengumumkan bahwa dengan akta tertanggal 21 Maret 2014 Nomor : 26 ; yang dibuat di hadapan NURLANI YUSUP, SH., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, telah diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham PT. INTERLINE INDONESIA, berkedudukan di Jakarta Barat sebagai berikut:

1. Membubarkan dan melikuidasi Perseroan serta mengangkat Likuidator Perseroan terhitung sejak keputusan rapat ini ditandatangani.
2. Menunjuk dan mengangkat serta memberikan kuasa sepenuhnya kepada Nyonya MAYRISKA HENDRAJAJA selaku Likuidator untuk melakukan hal-hal yang bersangkutan dengan pembubaran Perseroan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kepada para kreditor yang masih mempunyai tagihan atau piutang kepada perseroan PT. INTERLINE INDONESIA (dalam likuidasi) dapat menghubungi likuidator tersebut dalam waktu 60 hari sejak tanggal pengumuman ini pada alamat Pemata Taman Palem Blok B3/8, Pegadungan Kalideres, Jakarta Barat.

Jakarta, 15 April 2014
LIKUIDATOR

Pusat Protes Kuota Terigu Terlalu Tinggi

...is tepung terigu dan tuannya kurang lebih US\$ 100 atau kurang lebih impor bahan Franky, Gu- ekspor, dan ngan menerapkan sistem kuota. Hal tersebut dilaku- kan dengan tujuan agar industri tepung terigu tidak terganggu dengan serbuan produk impor tepung terigu. Bachrul menyatakan bahwa pihaknya akan men- takan kebijakan tersebut "Impor tepung terigu akan dimulai pada 15 April 2014. Besarnya kuota impor terigu akan ditetapkan oleh pemerintah. Selain pengendalian impor, pemerintah juga menerapkan safeguard terhadap terigu impor. Safeguard akan dilakukan bila realisasi impor melebihi kuota yang diberika- n. Sebelumnya pemerintah telah memberlakukan Masuk Tindakan Peng- Sementara (BMP/TS) sebesar 20% per- ang berlaku per-

Tanjung Perak (Surabaya), Tanjung Emas (Semarang) dan Pelabuhan Soekarno- Hatta (Makassar). Seba- sudah diberikan rekomendasi oleh pemerintah.

